

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR)
DALAM KEGIATAN PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT (PHBS)
DI KECAMATAN CISALAK KABUPATEN SUBANG**

Oleh :

Iwan Henri Kusnadi

Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang

Iwanhenri01@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam kegiatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang. Teori implementasi kebijakan yang digunakan menurut Grindle yang terdapat 2 dimensi yaitu isi kebijakan dan konteks implementasinya.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dan informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang dipandang dapat memberikan informasi yang memadai tentang kesehatan perilaku hidup bersih dan sehat dengan pemilihan secara *purposive sampling*. Instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri.

Hasil dari penelitian ini adalah dalam implementasinya belum berjalan dengan baik. Kegiatan PHBS masih belum memberikan perubahan yang baik dikarenakan masih kurangnya peran serta masyarakat dalam mensukseskan kebijakan CSR melalui kegiatan PHBS ini. Adanya penempatan penampungan air yang kurang strategis karena dalam penempatannya masih melibatkan peran atau kekuasaan dari aktor yang terlibat untuk menentukan lokasi penampungan air bersih tersebut sehingga menempatkan pembangunan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Peneliti memberikan saran perlu adanya sosialisasi ataupun pemicuan secara berkelanjutan dan menambah Sumber Daya Manusia dari pelaksana. Kepada masyarakat diharapkan dapat menjaga dan merawat fasilitas yang telah disediakan, serta dapat memanfaatkan fasilitas dengan baik

ABSTRACT

The purpose of this research is to investigate the implementation of the policy of Corporate Social Responsibility (CSR) activities Clean and Healthy Behavior in District Cisalak Subang district. Theory of policy implementation that is used by Grindle that there are two dimensions of the contents of the policy and implementation context.

The method used is qualitative research and informants are empirically -the person who is seen to memberikn adequate information about health and healthy hygienic behavior with the selection by purposive sampling. Instruments in this study is the researchers themselves.

The results of this research is in its implementation has not gone well. Activity PHBs still does not give a good change due to the lack of community participation in the success of CSR policies through these PHBS. The posting of the water reservoir is less strategic in the placement because they involve the role or powers of the actors involved to determine the location of water containers so that puts development does not correspond to the needs of the community.

Researchers advise socialization needs or triggering an ongoing basis and add to the Human Resources of the executive. The community is expected to maintain and care for the facilities provided, and can utilize the facilities properly.

PENDAHULUAN

Permasalahan yang dihadapi oleh bangsa dan negara semakin kompleks. Peran pemerintah yang dominan selama ini dalam usaha kesehatan telah menjadi penghambat munculnya inisiatif dan kreatif dimasyarakat yang sangat dibutuhkan untuk menumbuh gerakkan masyarakat yang sesungguhnya. Untuk mengatasi masalah kesehatan yang dialami atau dihadapi masyarakat maka pemerintah mengundang sektor bisnis untuk ikut terlibat dalam menangani masalah – masalah publik. Inilah yang menjadi akses pembuka dalam keterlibatan dalam aktivitas sosial atau yang dikenal sebagai *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau tanggung jawab sosial.

Tidak lepas dari tanggung jawab sosial perusahaan yang lebih dikenal CSR sekarang mulai mewabah dimana- mana karena perusahaan merupakan bagian dari masyarakat yang berkelanjutan dengan lingkungan hidup dan keberadaan dimana perusahaan menjalankan usahanya. Maka dari itu, perusahaan menyadari adanya sebuah tanggung jawab tindakan terhadap masyarakat sekitar dan lingkungannya, hal itu menunjukkan bahwa perusahaan harus mampu mensejahterakan masyarakat sekitar dan kelangsungan lingkungannya.

CSR atau tanggung jawab sosial adalah pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan harus dilakukan oleh semua pelaku pembangunan yaitu pemerintah, masyarakat dan juga kalangan bisnis. CSR adalah suatu bentuk wajib yang telah ditetapkan oleh pemerintah sejak tahun 2007, pasal 74 ayat 1 disebutkan bahwa perseroan terbatas yang menjalankan usaha dibidang bersangkutan dengan sumber daya alam wajib menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Peraturan CSR diperkuat oleh Undang – Undang No 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial dan perseroan terbatas. Kebijakan lain yang serupa terkait dengan tanggung jawab sosial adalah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di Jawa Barat.

Hal tersebut menunjukan bahwa perusahaan dituntut untuk membantu

pemerintah daerah untuk mendukung program pembangunan regional yang diimplementasikannya. Pemerintah yang menjadi penanggung jawab utama dalam mensejahterakan masyarakat dan melestarikan lingkungan tidak akan menaggung beban tersebut jika dilakukan sendiri, melainkan membutuhkan pelaku lain salah satunya yang paling potensial adalah perusahaan, agar akselerasi pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.

Sesuai dengan tahapan dan skala usahanya untuk membentuk program pengembangan masyarakat dan pengembangan wilayah pada masyarakat setempat yang meliputi pengembangan sumber daya manusia, kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi. Maka dari itu, perusahaan terasa memberikan manfaat bagi masyarakat disekitarnya dan menjadikan bagian dalam kehidupan mereka.

Pelaksanaan kebijakan CSR atau tanggung jawab sosial melibatkan dan bekerjasama dengan berbagai pihak mulai dari karyawan itu sendiri, Puskesmas, Aparat Desa sekitar, Aparat Kecamatan setempat, dan pemerintah Daerah. Di Kabupaten Subang khususnya Kecamatan Cisalak terdapat beberapa perusahaan yang berdiri. Salah satu perusahaan yang mendapat izin operasi dibidang pertambangan adalah PT. Tirta Investama Subang. Dengan beroperasinya perusahaan ini, maka secara otomatis perusahaan ini diwajibkan mematuhi peraturan perundang – undangan salah satunya terkait dengan tanggung jawab sosial (CSR) yang diwujudkan dalam bentuk pengembangan masyarakat, sebagaimana yang dimuat dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat yang sudah dijelaskan sebelumnya. Adapun program CSR di PT. Tirta Investama Subang adalah sebagai berikut :

1. *Water Access Sanitation Hygiene* (WASH), yaitu penyediaan sarana prasarana air bersih bagi masyarakat dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
2. Program Konservasi, yaitu penanaman pohon dan pendistribusian bibit pohon.
3. Program *Ekonomi Development*, yaitu pembekuan kelompok kewirausahaan masyarakat dan pembinaan kelompok lama seperti kelompok home industri (produksi makanan), kelompok mini konveksi (produksi pakaian dan kerudung), kelompok LED (simpan pinjam).

4. Program Safety Transport, seperti pembangunan bahu jalan, pembangunan drainase, pembangunan tembok penahan tanah (TPT).
5. Program Donation : Sinergi CSR dan Musrenbang Desa, yaitu pemberian bantuan bahan material untuk kegiatan pembangunan infrastruktur Desa.

Penerapan kebijakan CSR atau tanggung jawab sosial dalam rangka mengakselerasi pembangunan di Kabupaten Subang khususnya untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. Menurut data diperoleh bahwa pada tahun 2015 Kecamatan Cisalak dengan nilai indeks Pembangunan Manusia pada bidang kesehatan yang terendah di Kabupaten Subang yaitu 68.69 tahun (Sumber : Bappeda Kabupaten Subang, 2015). Suhubungan hal tersebut, maka penulis memfokuskan pada bidang kesehatan dengan melalui program CSR yang ditetapkan PT. Tirta Investama Subang yaitu program *Water Access Sanitation Hygiene* (WASH). dan salah satu kegiatannya terhadap masyarakat adalah Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

Masalah kesehatan yang ada dimasyarakat sangatlah banyak dan beragam macamnya. Penelusuran dari rumah ke rumah merupakan cara yang paling efektif untuk mengetahui secara nyata masalah kesehatan yang sebenarnya sedang dihadapi oleh masyarakat. Sebagian masyarakat ada yang menyadari bahwa ada masalah kesehatan yang sedang dialami dan sebagian masyarakat juga ada yang tidak menyadari bahwa terdapat masalah kesehatan yang dialami.

Hidup sehat merupakan suatu hal yang seharusnya memang diterapkan oleh setiap orang, mengingat manfaat kesehatan yang sangat penting bagi setiap manusia, mulai dari konsentrasi dalam bekerja dan beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari tentu memerlukan kesehatan, baik kesehatan pribadi maupun kesehatan anak serta keluarga untuk Menciptakan hidup sehat. Menciptakan hidup sehat sebenarnya sangatlah mudah serta murah, dibandingkan biaya yang harus kita keluarkan untuk pengobatan apabila mengalami gangguan kesehatan. Akan tetapi yang kebanyakan yang terjadi sudah mengidap penyakit baru mengobati sehingga akan membuat kerugian tersendiri bagi yang mengalaminya.

Menteri Kesehatan Republik Indonesia telah membuat Pedoman Pembinaan Perilaku

Hidup Bersih dan Sehat yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 2269/MENKES/PER/XI/2011 yang mengatur upaya peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat atau disingkat PHBS di seluruh Indonesia dengan mengacu kepada pola manajemen PHBS, mulai dari tahap pengkajian, perencanaan, dan pelaksanaan serta pemantauan dan penilaian.

Adapun yang melatarbelakangi kegiatan PHBS yaitu dasar peningkatan penderita diare di masyarakat Kecamatan Cisalak menurut data dari laporan tahunan Puskesmas Cisalak pada tahun 2014 sampai 2015 penderita diare mencapai 58%. Pada tahun 2012 tercatat sebanyak 359 penderita, kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2013 sebanyak 613 penderita. Berdasarkan peninjauan awal yang penulis lakukan, bahwa dalam pelaksanaan kebijakan CSR dengan melalui kegiatan PHBS di Kecamatan Cisalak terdapat masalah dalam tahapan pelaksanaannya, hal tersebut dapat dilihat dari indikator masalah sebagai berikut :

1. Intensitas sosialisasi yang dilakukan oleh aparat Kecamatan setempat, petugas Puskesmas dan aparat Desa sekitar masih kurang, karena hanya melakukan sosialisasi kegiatan PHBS acara pertemuan dan pertemuan itu dilakukan dari 1 tahun tersebut hanya dilakukan 1 sampai 2 kali dan bahkan dalam 1 tahun tersebut tidak dilakukan sosialisasi.
2. Jenis manfaat yang dihasilkan dari kebijakan CSR melalui kegiatan PHBS masih rendah, hal tersebut terlihat dari ditingkat rumah tangga mengenai pemenuhan kriteria hidup sehat di lingkungan rumah tangga di Kecamatan Cisalak hanya tercatat 42% (Sumber: Puskesmas Cisalak, 2015).
3. Masih kurangnya peran serta langsung dari masyarakat terhadap kegiatan PHBS, seperti halnya terdapat kurang lebih 80 jiwa penduduk di Kecamatan Cisalak yang melakukan aktivitas BABS di sungai (Sumber: Puskesmas Cisalak, 2015).
4. Adanya penempatan penampungan air bersih bagi masyarakat dari kebijakan CSR belum merata di Desa – Desa di Kecamatan Cisalak.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Nazir (2011:54) metode penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Melalui ini data-data dikumpulkan dari sumber data primer dan sekunder dimana data primer diperoleh dengan teknik wawancara, observasi, untuk memperoleh fakta yang relevan. Metode ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu masyarakat atau kelompok orang tertentu atau gambaran tentang suatu gejala atau hubungan antar dua gejala atau lebih.

Sedangkan pendekatan kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang di anggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khususnya ke tema-tema umum, dan menafsirkan makna data. Laporan akhir untuk penelitian ini memiliki struktur atau kerangka yang fleksibel. Siapapun yang terlibat dalam bentuk penelitian ini harus menerapkan cara pandang penelitian yang bergaya induktif, berfokus terhadap makna individual, dan menerjemahkan kompleksitas suatu persoalan (Craswell, 2010:4).

Data yang dihasilkan dan diolah dalam penelitian kualitatif berupa data yang sifatnya deskriptif seperti transkrip wawancara, catatan lapangan, gambar, foto, rekaman video, dan lain-lain. Dalam penelitian kualitatif ini perlu menekankan pada pentingnya kedekatan dengan orang-orang dan situasi penelitian agar peneliti memperoleh pemahaman jelas tentang realitas dan kondisi kehidupan nyata.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PT. Tirta Investama (Aqua) Kabupaten Subang memiliki visi yakni “Satu team untuk

menjadi pabrik berkelas dunia di group Danone dengan keselamatan dan kesehatan menjadi *value, quality dan Produktiviti* yang tinggi disemua area dan tahapan proses, menjadi great place untuk bekerja dan mengembangkan bisnis berkelanjutan”. Adapun misinya adalah Water Acces Sanitation and Hygiene (WASH), yakni Kegiatan dari program Water Acces Sanitation and Hygiene (WASH) adalah penyediaan sarana dan prasarana air bersih bagi masyarakat dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Dengan lokasi Kampung Neglasari dan Kampung Salam Desa Darmaga, Kampung Patrol Desa Mayang Kecamatan Cisalak dan Kampung Bantar Panjang Hilir dan Girang Desa Kecamatan Kasomalang Kabupaten Subang. Adapun program-program PT. Tirta Investama (Aqua) Kabupaten Subang sebagai berikut : 1) Program Konservasi yakni Kegiatan yang dilakukan pada program konservasi yaitu penanaman pohon contohnya di hutan adat dusun Banceuy, Desa Sanca Kecamatan Ciater Kabupaten Subang 2000 pohon buah – buahan serta 2000 pohon jenis kayu dan pendistribusian bibit pohon contohnya pendistribusian 20.000 bibit pohon kayu – kayuan untuk kelompok tani masyarakat di Desa Pasanggrahan Kecamatan Kasomalang, Desa Mayang Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang; 2) Program Ekonomi Development, yakni Kegiatan program ekonomi development yang dilakukan adalah pembentukan kelompok kewirausahaan masyarakat dan pembinaan kelompok lama. terbentuknya kelompok kewirausahaan masyarakat adalah : Kelompok home indsutri (Produksi Makanan) di Desa Pasanggrahan Kecamatan Kasomalang, Kelompok Mini Konveksi (Produksi Pakaian dan Kerudung) di Desa Darmaga, 2 Kelompok LED (Simpan Pinjam), di Desa Pasanggrahan dan Desa Darmaga, Program Safety Transport. Adapun kegiatan program safety transport yang dilakukan ini yaitu : a) Pembangunan pengembangan bahu jalan Propinsi jalur Cisalak – Jalan Cagak, b) Pembangunan darinase dijalur Propinsi jalur Cisalak – Jalan Cagak, c) Pembangunan tembok penahan tanah (TPT) di Kampung Nahun Desa Darmaga Kecamatan Cisalak jalur jalan dari pabrik menuju Sumedang; 3) Program Donation : Sinergi CSR dan Musrenbang Desa, yakni pemberian bantuan bahan material untuk kegiatan pembangunan infrastruktur Desa.

Dalam pasal 74 ayat 1 Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 disebutkan bahwa Perseroan Terbatas yang menjalankan usaha di bidang bersangkutan dengan sumber daya alam wajib menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 02 Tahun 2013 tentang pedoman tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan serta program kemitraan dan bina lingkungan di Jawa Barat.

Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan serta program kemitraan dan bina lingkungan adalah komitmen perusahaan untuk berperan dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan, komunitas setempat, maupun masyarakat. Agar pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan serta program kemitraan dan bina lingkungan memperoleh hasil yang optimal, kegiatan yang dilaksanakan harus bersinergi dengan program Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pola perencanaan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan serta program kemitraan dan bina lingkungan dilaksanakan melalui sinkronisasi perencanaan pembangunan di seluruh Kabupaten/Kota.

Pada Pasal 3 maksud penetapan Pedoman TJSL dan PKBL adalah untuk mensinergikan penyelenggaraan Program TJSL dan PKBL untuk bidang sosial, lingkungan, kesehatan, pendidikan, ekonomi dan infrastruktur desa dan kota, dalam rangka optimalisasi program pembangunan di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Program pembangunan yang dapat dibiayai melalui dana TJSL dan PKBL, meliputi:

1. Sosial, diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
2. Lingkungan, yang diarahkan pada kegiatan pemberdayaan kondisi sosial masyarakat melalui peningkatan kapasitas, pendidikan lingkungan hidup dan konservasi, pencegahan polusi, penggunaan sumberdaya yang berkelanjutan, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim serta kampanye, proteksi dan pemulihan lingkungan;

3. Kesehatan, yang diarahkan agar seluruh wilayah Jawa Barat dapat menyelenggarakan kesehatan yang memadai, meliputi usaha kesehatan; pembiayaan kesehatan; sumberdaya kesehatan; sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan; serta pemberdayaan masyarakat;
4. Pendidikan, yang diarahkan untuk mencapai bebas putus jenjang sekolah pendidikan dasar dan menengah, beasiswa serta sarana dan prasarana pendidikan formal, non formal dan informal;
5. Peningkatan daya beli, yang diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pengembangan sektor koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah; agribisnis; perikanan; dan pasar tradisional;
6. Infrastruktur dan sanitasi lingkungan, yang diarahkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana lingkungan perdesaan dan perkotaan;
7. Sarana dan prasarana keagamaan; dan
8. Program pembangunan lainnya yang disepakati oleh perusahaan, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Dalam implementasi terhadap satu kebijakan perlu mendapat dukungan dan perhatian oleh lapisan masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Subang dari berbagai aspek. Dukungan ini sangat diperlukan guna terwujudnya keberhasilan terhadap kebijakan yang telah dilakukan. Suatu kebijakan bisa lahir karena keinginan untuk mencapai sesuatu cita-cita bersama yang telah dinyatakan secara tertulis dalam bentuk seperangkat aturan hukum. Apapun yang menjadi sasaran sebuah kebijakan tetap memerlukan dukungan pelaksana dalam yurisdiksi kebijakan tersebut.

Atas dasar karena suatu kebijakan memerlukan dukungan, maka dalam implementasi kebijakan Tanggungjawab Sosial erat kaitannya dengan konsep pengembangan masyarakat atau *community development* (Comdev), dimana Comdev merupakan bagian penting dalam proses implementasi kegiatan CSR. Sementara Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL), sebagaimana tertuang dalam Pasal 74 UU No. 40/2007 tentang perseroan Terbatas merupakan kepatuhan perusahaan kepada peraturan sektoral yang sudah ada. Dimana perusahaan harus mengacu kepada semua peraturan

perundang - undangan dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan lingkungan hidup, antara lain UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH); UU No. 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah, PP No. 82/2001 tentang Pengendalian Pencemaran Udara. Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) sebagai institusi yang bertanggung jawab di bidang lingkungan, akan terus mendorong perusahaan untuk melaksanakan kegiatan CSR bidang lingkungan.

Berikut ini penulis akan membahas dan menyajikan sekaligus menganalisis hasil penelitian tentang implementasi kebijakan menurut Grindle dalam Nugroho (2014:671) ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya.

Dimensi Isi Kebijakan

Program Perilaku Hidup Bersih dan Sehat adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran yang menjadikan seseorang, sekeluarga, atau masyarakat maupun menolong dirinya sendiri (mandiri) dibidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan. Dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran dari masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat.

PHBS merupakan suatu program dari implementasi CSR yang dilakukan oleh PT. Tirta Investama Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang. Berikut adalah gambaran implementasi CSR yang dilakukan oleh PT. Tirta Investama melalui teori yang dikemukakan oleh Grindle yaitu dari segi isi kebijakan dan konteks implementasinya.

Adapun dari segi isi Kebijakan menurut teori Grindle adalah :

Kepentingan yang terpengaruhi oleh Kebijakan

Suatu kebijakan termasuk diantaranya adalah sebuah peraturan yang dibuat oleh pemerintah untuk menyelesaikan segala permasalahan – permasalahan ditengah masyarakat dengan melibatkan kepentingan – kepentingan dari pihak tertentu atau pun pihak terkait pada tahap implementasinya. Dalam sebuah kebijakan CSR ini sasaran utamanya adalah masyarakat, yaitu bertujuan untuk meningkatkan jumlah nilai dan perilaku hidup bersih dan sehat.

Untuk lebih jelasnya peneliti menanyakan kepada petugas Kesling Puskesmas Kecamatan Cisalak sebagai berikut : “Tentu tujuan awal dari Perilaku Hidup Bersih dan Sehat ini untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat. Karena biasanya mereka melakukan aktivitas keseharian mereka seperti mandi, mencuci, itu kesungai, tentu saja perilaku masyarakat kurang bisa menjaga kebersihan dan kesehatan dirinya. Nah, apalagi didukung dengan adanya PT. Aqua di Darmaga Cisalak yang memberikan bantuan kepada kita berbagai program termasuk PHBS. Tentu saja kepentingan yang terpengaruhi oleh Kebijakan CSR dengan kegiatan PHBS adalah masyarakat di Kecamatan Cisalak, seperti Desa Darmaga Kemudian, lingkungan Kecamatan Cisalak bisa lebih bersih.

Kemudian, peneliti juga mewawancarai petugas Kecamatan Cisalak selaku anggota seksi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat mengemukakan hal serupa sebagai berikut :

“Kepentingan – Kepentingan yang terpengaruhi oleh Kebijakan CSR ini dari kegiatan PHBS adalah masyarakat yang memang mendapatkan fasilitas untuk berperilaku sehat. Seperti yang tadinya tidak punya WC, yang mencucinya sering di sungai kita bantu dengan fasilitas yang lebih baik. Jadi dengan adanya bantuan seperti ini diharapkan masyarakat bisa berperilaku sehat, terhindar dari segala penyakit dan bisa menjaga lingkungannya”.

Kepentingan yang dipengaruhi dalam kebijakan CSR melalui kegiatan PHBS yang utamanya adalah masyarakat. Karena kebijakan tersebut untuk merubah masyarakat menjadi lebih baik lagi dalam berperilaku sehat dan dapat menjaga lingkungannya. Hal tersebut pula ditegaskan oleh Ketua LPM Desa Darmaga mengemukakan sebagai berikut : “Untuk kepentingan yang terpengaruhinya ini jelas masyarakat di desa – desa yang ada di Kecamatan Cisalak. Kalau kepentingan terkait dari PHBS ini adalah Dinas Kesehatan, PT. Aqua itu sendiri sebagai penyumbang bantuan, Puskesmas setempat yang secara langsung ikut serta dalam PHBS”.

Dari hasil wawancara dengan staf di PT. Tirta Investama (Aqua) menjelaskan bahwa tuntutan masyarakat akan PHBS sangat besar kemudian PT. Tirta Investama juga peduli terhadap warga Kampung Neglasari Desa Darmaga.

Kemudian penulis mewawancarai salah satu warga Kampung Neglasari Desa Darmaga Kecamatan Cisalak berpendapat bahwa: “Kami sangat senang bahwa di Kecamatan Cisalak mengadakan program – program CSR dengan dukungan dari PT. Tirta Investama. Program yang diberikan kepada masyarakat lingkungan sekitar menjadikan kami sebagai warga ikut peduli dalam melestarikan lingkungan dan kebersihan. Namun masih terdapat sebagian warga masih saja tidak mengindahkan lingkungannya”.

Berdasarkan uraian – uraian dari para informan di atas, memang masyarakat sebagai sasaran utama di dalam pembuatan suatu kebijakan oleh pemerintah, yaitu untuk mensejahterakan masyarakatnya tentu saja kepentingan – kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan CSR dari kegiatan PHBS ini adalah masyarakat. Adapun secara rinci kebijakan CSR melalui kegiatan PHBS bertujuan untuk :

1. Meningkatkan praktik hidup bersih dan sehat di masyarakat;
2. Meningkatkan jumlah masyarakat yang memiliki akses air bersih dan air minum yang berkelanjutan;
3. Meningkatkan kapasitas masyarakat dan kelembagaan lokal (pemerintah daerah) dalam penyelenggaraan layanan hidup sehat.
4. Meningkatkan efektivitas dan kesinambungan jangka panjang kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti bahwa masyarakat menjadi sasaran kebijakan. Karena tujuan dari kebijakan CSR ini adalah untuk meningkatkannya pembangunan masyarakat seperti akses layanan air minum dan air bersih, baik masyarakat dipedesaan yang memiliki kekurangan cakupan air serta masyarakat miskin khususnya yang berada di daerah tertinggal. Kemudian, apabila hasil wawancara para informan sebelumnya dikaitkan dengan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Grindle pada indikator kepentingan yang terpengaruhi adalah sebuah peraturan yang dibuat oleh pemerintah untuk

menyelesaikan segala permasalahan – permasalahan ditengah masyarakat dengan melibatkan kepentingan – kepentingan dari pihak tertentu atau pun pihak terkait pada tahap implementasinya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kebijakan CSR melalui kegiatan PHBS kepentingan yang terpengaruhinya sudah sesuai dengan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa kenyataan di lapangan sudah menerapkan indikator kepentingan yang terpengaruhi yang dikemukakan oleh Grindle tersebut.

Jenis Manfaat Yang Dihasilkan

Suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah baik itu program, peraturan, atau undang – undang sebagai landasan hukumnya harus dapat memberikan hasil yang bermanfaat dan berdampak positif serta dapat merubah kearah yang lebih baik dari hasil pengimplementasiannya. Tipe manfaat yang dihasilkan dalam suatu program seperti PHBS adalah bertujuan untuk meningkatkan masyarakat berperilaku hidup bersih dan sehat.

Untuk dapat mengetahui apakah manfaat yang dihasilkan dalam kebijakan CSR melalui kegiatan PHBS ini, maka peneliti mewawancarai Petugas Kecamatan Cisalak selaku anggota Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat sebagai berikut : “Manfaat – manfaat yang dihasilkannya dari kebijakan CSR melalui kegiatan PHBS yang dibantu oleh PT. Tirta Investama. Ya sekarang masyarakat tidak perlu pergi ke sungai kalau mau mandi, nyuci, dan kegiatan – kegiatan lain pun bisa dilakukan dirumah. Sedikit demi sedikit masyarakat tahu pentingnya menjaga kesehatan lingkungan dan badan sendiri. Tetapi masih saja ada masyarakat yang tidak peduli dengan lingkungannya sendiri dan belum bisa menjaga kebersihan, walaupun sudah ada sosialisasi dari kami dan pihak puskesmas, serta Ibu – Ibu Kader”.

Selanjutnya pemaparan menurut petugas KESLING Puskesmas pada Kecamatan Cisalak menjelaskan bahwa : “Manfaat dari kegiatan itu bisa menciptakan hidup yang sehat dan bersih dan terhindar dari segala penyakit. Maka kami dan pihak Kecamatan setempat serta para kader, tokoh masyarakat, aparat Desa dengan menyediakan dan memenuhi salah satunya air bersih di suatu daerah dan mencoba merubah kebiasaan para warga untuk bisa berperilaku hidup bersih sehingga tidak ada lagi warga yang mandi dan mencuci di sungai. Jadi

manfaat yang dihasilkan dengan adanya kebijakan CSR khususnya kegiatan PHBS yang dibantu dengan PT. Tirta Investama adalah masyarakat terpenuhi kebutuhan airnya baik air bersih ataupun air minum di tempat mereka tinggal serta mulai adanya perubahan pola sikap ataupun kebiasaan dari masyarakat itu sendiri”.

Adapun pemaparan dari Ketua LPM Desa Darmaga memaparkan bahwa : “Dengan adanya kebijakan CSR khususnya kegiatan PHBS menjadikan kesadaran masyarakat lingkungan Kecamatan Cisalak untuk lebih meningkatkan partisipasinya terhadap program tersebut kalau mengenai jenis manfaat yang dihasilkan, masyarakat daerah pegunungan termasuk Kecamatan Cisalak sudah cukup bisa menjaga lingkungannya”.

Berdasarkan keterangan Kepala SR PT. Tirta Investama Kecamatan Cisalak menjelaskan bahwa: “CSR telah masuk di Kecamatan Cisalak pada tahun 2006, sejalan dengan waktu pada tahun 2008 PT. Tirta Investama sudah serius untuk memberikan tanggungjawabnya terhadap masyarakat, lingkungan setempat kemudian PT. Tirta Investama bekerja sama dengan pemerintah setempat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu, tahun 2008 PT. Tirta Investama sudah serius menjalankan program yang telah bekerjasama dengan pemerintah setempat baik itu program yang terencana ataupun yang tidak terencana. adapun jenis program yang telah dilaksanakan yaitu program WASH yang didalamnya meliputi kegiatan penyediaan sarana dan prasarana air bersih bagi masyarakat dan PHBS, program konservasi, program *economy development*, program *safety transport*, program *donation*. Sedangkan program tidak terencana diperoleh dari permintaan dan kebutuhan dari masyarakat itu sendiri”.

Adapun pemaparan dari warga kampung Salam Desa Darmaga sebagai berikut : “Walaupun ada kegiatan PHBS yang dilaksanakan oleh pemerintah, keluarga saya serta masyarakat kampung ini belum merasakan manfaat yang benar – benar bagus. Jadi terkadang saya juga masih mandi dan mencuci di sungai soalnya bantuan penyediaan air bersihnya belum dapat di akses oleh seluruh warga”.

Berdasarkan hasil wawancara para informan dan observasi, mengenai tipe manfaat yang dihasilkan oleh kebijakan CSR melalui

kegiatan PHBS dengan tujuan untuk dapat merubah kebiasaan masyarakat untuk kebiasaan hidup bersih dan sehat dan menimbulkan rasa kepedulian terhadap lingkungan sekitar tempat tinggal mereka. Karena dengan aktivitas masyarakat untuk kegiatan sehari – hari mereka dengan di sungai atau di kebun, tentu masyarakat tidak menjaga kebersihan lingkungannya. Maka dapat mengakibatkan tercemarnya atau membuat lingkungan menjadi kotor dan menimbulkan adanya penyakit yang dapat menularkan dari air dan lingkungan seperti contohnya diare. Namun dengan adanya kegiatan PHBS di Kecamatan Cisalak tersebut, masih belum memberikan jenis manfaat yang benar – benar sangat baik atau belum berguna untuk masyarakat dalam melakukan aktivitas keseharian mereka. Maka dengan demikian hal tersebut bertentangan dengan teori yang dikemukakan oleh Grindle dimana bahwa isi kebijakan tersebut didalamnya harus ada jenis manfaat yang dihasilkan.

Derajat Perubahan Yang Diinginkan

Dalam suatu kebijakan tidak dapat dipisahkan dari adanya suatu target yang hendak dicapai atau ingin dicapai. Derajat perubahan yang ingin dicapai dari implementasi kebijakan CSR melalui program PHBS adalah untuk memberikan pelayanan yang optimal untuk masyarakat agar dapat memenuhi kecukupan air minum dan air bersih serta sanitasi yang berbasis masyarakat. Dalam pembuatan suatu kebijakan ataupun program tentu melihat suatu fenomena di tengah masyarakat yang cukup meresahkan, *urgent* yang tentunya sangat perlu untuk diselesaikan segera mungkin. Dari stau fenomena atau situasi yang awal tentu diharapkan setelah adanya kebijakan atau program yang menangani dapat berubah menjadi situasi yang lebih baik lagi sesuai dengan tujuan yang awal dibuatnya kebijakan tersebut.

Adapun tujuan program PHBS yang dipaparkan oleh Kepala SR PT. Tirta Investama, mengatakan bahwa: “Dengan program yang telah diterapkan PT. Tirta Investama tentang PHBS di kawasan Kecamatan Cisalak diharapkan tingkat kesehatan masyarakat jauh lebih baik. Kemudian dalam mengoptimalkan keberadaan CSR terutama dalam PHBSnya, PT. Tirta Investama memberikan pendidikan dan pelatihan khususnya kepada masyarakat

lingkungan sekitar Kecamatan Cisalak sehingga mereka dapat memiliki strategi dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan dan sikap – sikap dalam bermasyarakat. Secara tidak langsung dengan memiliki strategi maka masyarakat dapat memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapinya khususnya pada masalah PHBS dan umumnya pada masalah – masalah lainnya”.

Hal senada diungkapkan oleh Petugas KESLING Puskesmas Kecamatan Cisalak. Berikut adalah wawancaranya: “Dengan adanya program PHBS ini diharapkan kesadaran masyarakat untuk dapat hidup bersih dan sehat meningkat, serta menjaga kebersihan lingkungan sekitar tempat tinggal mereka”.

Adapun pemaparan dari Ketua LPM Desa Mayang memaparkan bahwa: “Memang dalam mengimplementasikannya tidak semudah membalikan tangan yah, karena untuk merubah suatu kebiasaan yang selalu dilakukan oleh masyarakat itu sulit. Ya, untuk merubah kebiasaan itu memang sulit, semua membutuhkan proses dengan jangka waktu yang lumayan panjang”.

Kemudian salah satu petugas Kecamatan Cisalak anggota Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat mengatakan bahwa: “Dari desa yang penerima PHBS tentu saja desa tersebut memiliki kebiasaan buang air besar sembarangan atau banyaknya kasus diare di desa tersebut yang menyebabkan perlu adanya program PHBS apalagi di Kecamatan Cisalak di dukung oleh PT. Tirta Investama. Dengan adanya PHBS tentu diharapkan wilayah Kecamatan Cisalak memiliki kecukupan air bersih bagi masyarakat”. Adapun pendapat warga Kampung Patrol Desa Mayang mengenai program PHBS sebagai berikut: “Adanya program PHBS ini saya sebagai warga berharap program ini dapat berkelanjutan dalam pemenuhan kebutuhan warga di desa yang memang sebelum ada program PHBS pada ke sungai atau kebun yah, jadi diharapkan tidak ada lagi warga di desa yang ke kebun atau ke sungai untuk mencuci, mandi, buang air kecil/besarnya. tetapi masih saja sampai sekarang ini masih ada warga yang mandi dan mencuci di sungai”.

Berdasarkan hasil pemaparan wawancara informan di atas dan observasi, bahwa derajat perubahan yang ingin dicapai atau capaian dari kebijakan CSR melalui program PHBS tentu

saja adalah terpenuhinya kebutuhan masyarakat air bersih ataupun air minum serta terlaksananya lingkungan bersih dan sehat. kemudian adanya perubahan perilaku masyarakat yang berhenti untuk tidak mandi dan mencuci ataupun lainnya di sungai atau sembarangan dan meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya hidup bersih dan sehat.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilapangan ditemukan adanya ketidaksesuaian antara teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Grindel. Namun demikian kenyataan dilapangan mengenai PHBS masih belum memberikan perubahan yang baik.

Kedudukan Pembuat Kebijakan

Letak pengambilan keputusan tentunya sangat erat kaitannya dengan para *stakeholders* dimana setiap keputusan yang diambil dalam menjalankan suatu kebijakan satu program harus sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang ada dan keputusan yang diambil tentu untuk kepentingan bersama. Pengambilan keputusan di dalam suatu kebijakan memegang peranan penting dalam menentukan keberhasilan suatu program dalam pengimplementasiannya.

Dalam bagian ini peneliti akan menjelaskan letak pengambilan keputusan mengenai kebijakan dari instansi terkait dalam kebijakan CSR ini tertuma melalui kegiatan PHBS. Berikut ini hasil wawancara dari petugas Kecamatan Cisalak anggota Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat mengatakan bahwa : “Program CSR itu berasal dari dari PT. Tirta Invesatama atau Aqua. Kemudian bekerjasama dengan pihak pemerintah setempat dengan tujuan diberikan kepada daerah – daerah lingkungan Kecamatan Cisalak. Program CSR itu banyak, tetapi kalau untuk kegiatan PHBS tersebut difokuskan kepada pembentukan struktur organisasi yang terdiri dari RT/RW dan juga kader – kader masyarakat Kecamatan Cisalak. Keterlibatan kader, aparat Desa, aparat Kecamatan, tokoh masyarakat serta aparat Puskesmas menjadikan kegiatan PHBS dirasakan akan jauh lebih baik karena keberadaan mereka menjadikan lebih mudah dalam membuat strategi dan penanganan situasi dalam lingkungan.”

Adapun hasil wawancara dengan Ketua LPM Desa Mayang adalah : “Instansi terkait pada program PHBS ini tentu selain dari pihak kami

Dinas Kesehatan, ada pula dari Puskesmas – Puskesmas di Kecamatan terkait. Kalau untuk di Kecamatan Cisalak ada keterlibatan juga dari PT. Tirta Investama atau Aqua itu sendiri. Jadi, agar kegiatan PHBS ini berjalan dengan baik atau mudah – mudahan berkelanjutan maka perlu didukung oleh pihak swasta yaitu salah satunya PT. Tirta Investama tersebut”.

Kemudian, penjelasan mengenai kedudukan pembuat kebijakan diungkapkan oleh Kepala SR PT. Tirta Investama sebagai berikut : “Penerapan kebijakan tanggung jawab sosial dari perusahaan atau di sebut dengan CSR pada PT. Investama ini menempuh cara bottom – up. Langkah ini diawali dengan penyerahan kewenangan kantor pusat kepada unit kerja di Kecamatan Cisalak dan unit kerja di Desa – Desa yang selanjutnya dikenai pertanggungjawaban kerja melalui laporan tahunan. Bentuk bottom – up ini menandakan bahwa PT. Tirta Investama dimana upaya – upaya yang ditempuh mnkankan pada bagaimana masyarakat Cisalak sebagai kelompok sasaran dapat memahami permasalahan pembaruan seperti perubahan sikap, keterampilan, dan nilai – nilai yang berhubungan dengan masalah kesehatan lingkungan”.

Berdasarkan wawancara dengan Petugas KESLING Puskesmas Cisalak mengemukakan sebagai berikut : “Untuk Puskesmas sendiri di Desa Kecamatan Cisalak penerima program PHBS saya bertugas untuk melakukan pemicuan terhadap masyarakat pada saat program tersebut terealisasikan sampai program tersebut selesai pengerjaan sampai fisiknya. Pihak Puskesmas ini, melakukan pemicuan setiap minggunya bertujuan untuk memberikan informasi dan mencoba merubah kebiasaan masyarakat menjadi masyarakat yang peduli dengan kesehatan, kebersihan dan lingkungan yang bersih. Karena untuk merubah kebiasaan itu sulit makanya perlu dilakukannya pemicuan berkelanjutan”.

Adapun menurut Warga Kampung Patrol Desa Mayang menjelaskan bahwa : “Warga kami ini yang katanya Desanya dapat program PHBS, seperti ada bantuan pembuatan bak tempat air bersih. Tapi kalau ada pelatihan harus hidup bersih itu jarang. Tapi kalau ada pelatihan juga kadang 1tahun sekali dan memang masyarakat dilibatkan. Dan kalau dari para petugas Puskesmas jarang mantau ke lapangan, biasanya suka dari Bidan Desa, para kader posyandu aja ”.

Adapun kegiatan pokok penyelenggaraan kebijakan CSR melalui kegiatan PHBS untuk mencapai tujuan dan sasarannya yaitu :

- a. Sosialisasi oleh pemerintah Kecamatan kepada pemerintah Desa
- b. Seleksi Desa yang dijadikan sasaran.
- c. Penetapan Desa yang menjadi sasaran.
- d. Pelaksanaan program tingkat masyarakat (perluasan, pengembangan, atau optimalisasi standar pelayanan air bersih)
- e. Peningkatan kapasitas pemerintah setempat dalam kegiatan PHBS dengan meliputi pengelolaan air bersih berbasis masyarakat yang berkelanjutan.
- f. Evaluasi dampak untuk mengetahui perubahan yang dihasilkan dari kegiatan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka dapat dipahami bahwa kerjasama yang terjalin antar pihak yang terkait dengan kegiatan PHBS telah berjalan dengan baik. Namun peran dari masyarakat sangatlah penting sebagai sasaran dari kebijakan CSR ini karena tanpa adanya dukungan dari masyarakat tentu saja program PHBS tidak akan berjalan dengan baik. Dan apabila dikaitkan dengan teori Grindle mengenai kedudukan para kebijakan bahwa para *stakeholders* dimana setiap keputusan yang diambil dalam menjalankan suatu kebijakan CSR melalui kegiatan PHBS sudah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang ada dan keputusan yang diambil tentu untuk kepentingan bersama. Dengan demikian, kedudukan para *stakeholder* dalam kebijakan CSR melalui kegiatan PHBS sudah sesuai dengan teori Grindel.

(Siapa) Pelaksana Program

Pelaksana program adalah suatu hal yang sangat penting dalam suatu kebijakan, karena pelaksana program adalah penggerak ataupun alat untuk mencapai suatu keberhasilan yang telah ditetapkan pada awal pembuat kebijakan. Dapat dikatakan para pelaksana ini adalah penyedia dan yang pemberi pelayanan bagi masyarakat di dalam suatu program, selain itu pelaksana program juga sebagai tolok ukur untuk melihat sejauh mana suatu program diimplementasikannya. Untuk mengetahui pelaksana program PHBS peneliti melakukan

pengamatan di lapangan, wawancara yang mendalam kepada informan terkait.

Berikut ini merupakan pemaparan dari Ketua LPM Desa Darmaga sebagai berikut: “Pelaksana dari program PHBS seperti yang telah saya sebutkan yaitu kita Dinas Kesehatan berkoordinasi langsung dengan pihak – pihak yang terkait dengan program PHBS. Diantaranya yaitu Kecamatan Cisalak, puskesmas dan tidak lupa adanya peran aktif dari masyarakat yang ikut serta mensukseskan program PHBS ini”.

Kemudian peneliti mewawancarai Petugas KESLING Puskesmas Cisalak mengemukakan sebagai berikut : “Kita sebagai pelaksana program melaksanakan tugas yang diberikan oleh Pemerintah Pusat untuk dilaksanakan atau diimplementasikan di suatu Kabupaten/Kota ataupun di desa yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima program tersebut. Selain itu masyarakat sendiri pun selain menjadi sasaran penerima program, masyarakat pun menjadi pelaksana program juga. Karena masyarakat pun ikut serta dalam pembangunan program tersebut”.

Hal senada diungkapkan oleh petugas Kecamatan Cisalak anggota Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat mengatakan: “Dalam pelaksanaan program PHBS ini kami bekejasama dengan pihak lain yang terkait dengan Program PHBS ini untuk mensukseskan pelaksanaan program. Sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat dari program PHBS ini dan manfaat yang dirasakan dapat berkelanjutan”.

Kemudian mengenai pelaksana kebijakan, diungkapkan oleh Kepala SR PT. Tirta Investama sebagai berikut: “Iya program PHBS merupakan bentuk dari tanggungjawab sosial dari PT. Tirta investama. dan dalam melaksanakan program tersebut kami bekerjasama dengan pihak yang terkait dengan program PHBS di Kabupaten Subang dan khususnya di Kecamatan Cisalak untuk keberhasilan pelaksanaan program PHBS sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat di sekitar terutama di Kecamatan Cisalak”.

Adapun wawancara dengan warga Kampung Salam Desa Darmaga yang menyatakan bahwa: “Para petugas dalam

melaksanakan kegiatan PHBS biasa – biasa saja, terkadang kalau ada pelatihan juga ada sebagian petugas yang serius memberikan arahan, tetapi ada saja yang ngobrol saja”.

Dari hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa program PHBS ini dilaksanakan dengan terstruktur yang baik antara pihak yang terkait dengan program tersebut. Hanya saja untuk merubah kebiasaan masyarakat sangat sulit jika tidak dilakukan secara berkelanjutan. Maka langkah strategis harus dilakukan agar program tersebut dapat berjalan berkelanjutan, seperti memberikan pelatihan dan pembekalan kepada masyarakat mengenai pentingnya hidup bersih dan sehat sehingga masyarakat dapat secara mandiri melanjutkan program yang telah diimplementasikan. Kemudian, apabila dikaitkan dengan teori yang dikemukakan oleh Grindle dengan hasil wawancara di lapangan belum sesuai. Hal itu terlihat dari hasil wawancara dari salah seorang warga mengatakan bahwa sikap petugas dalam memberikan pelatihan untuk kegiatan PHBS masih kurang dalam memberikan petunjuk teknis mengenai kegiatan PHBS ini.

Sumber Daya Yang Dikerahkan

Dalam pelaksanaan atau pengimplementasian suatu kebijakan perlu didukung dengan adanya sumber daya yang dapat memberikan pengaruh positif dan berguna untuk mensukseskan dalam pelaksanaan suatu kebijakan ataupun program tersebut. Sumber daya yang memadai tentunya sangat membantu di dalam pelaksanaan suatu kebijakan tersebut agar dapat berjalan dengan baik, maksimal, efektif dan efisien.

Pelaksana kebijakan akan berjalan dengan baik dan lancar apabila didalam pelaksanaannya dilakukan oleh sumber daya manusia (SDM) yang mencukupi dan tentunya berkualitas. Dalam pencapaian tersebut tentu membutuhkan SDM yang sesuai dengan kemampuan, yang memiliki kecakapan dan kecukupan untuk menjalankan suatu kebijakan tersebut.

Berikut adalah wawancara dengan Kepala SR PT. Tirta Investama sebagai berikut: “Sumber daya yang digunakan dalam program PHBS tentu saja dari sumber daya manusia yang dikerahkan baik dari pusat, provinsi dan kabupaten/kota hingga tingkat desa. Baik dimulai dari pegawai dari instansi terkait,

masyarakat di desa sebagai sasaran, tokoh ulama dan tokoh masyarakat di sekitar wilayah desa serta Kecamatan dan staf nya, kemudian dari sumber daya alam yang digunakan dalam program adalah lahan – lahan untuk lokasi penyimpanan penampungan air bersih atau air minum berbasis masyarakat. Serta perlunya penyehatan lingkungan atau menjaga kesehatan dan kebersihan dari sungai dan lingkungan sekitar”.

Berikut adalah pemaparan menurut Petugas KESLING Puskesmas Cisalak sebagai berikut: “Keikutsertaan berbagai pihak pelaksana tentunya yang sudah ditetapkan oleh peraturan yang berlaku mengenai pelaksanaan program PHBS ini, berbagai instansi terkait dengan PHBS ini tentu memiliki tupoksinya masing – masing dalam melaksanakan tugasnya. Selain itu, memang fungsi lokasi ataupun lingkungan di sekitar desa menjadi sumber daya alam yang menunjang untuk keberhasilan program ini”.

Kemudian petugas Kecamatan Cisalak anggota Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat mengemukakan pendapatnya mengenai sumber daya yang dikerahkan dalam program PHBS. Sebagai berikut: “Dari semua sumber daya yang terlibat memang yang terpenting adalah sumber daya manusianya, dimana kesediaannya masyarakat untuk berkontribusi seperti berpartisipasi aktif dalam seluruh kegiatan PHBS, kemauan masyarakat untuk merubah kebiasaan atau perilaku mereka seperti menghilangkan kebiasaan BABS dan mulai berperilaku hidup bersih dan sehat. Kemudian barulah ditunjang oleh para pelaksana atau pemberi pelayanan yang memiliki kecakapan dan komitmen dalam mensukseskan program ini”.

Hal senada diungkapkan oleh ketua LPM Desa Darmaga mengenai sumber daya yang dikerahkan. Yaitu : “Memang yang paling penting dalam pelaksanaan program PHBS ini adalah masyarakat sebagai penerima dan sasaran dari program. Karena tanpa adanya kontribusi yang aktif dan kemauan untuk merubah kebiasaan dari masyarakat itu sendiri maka program PHBS ini tidak akan berjalan dengan baik. Karena kita hanya memfasilitasi dan memberikan pelatihan serta pengajaran kepada masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat”.

Adapun hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan warga Kampung Salam Desa Darmaga Kecamatan Cisalak. Sebagai berikut: “Kalau sumber daya dari para petugas dalam menjalankan kegiatan PHBS, masih biasa – biasa saja, soalnya waktu itu saya pernah lihat pas waktu ada pelatihan dan langsung praktik langsung ada sebagian petugas yang kurang mengerti betul. Mungkin itu petugasnya baru atau kurang paham. Yang saya lihat waktu itu ada petugas yang kurang paham begitu”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, yang menjadi inti dari keberhasilan pengimplementasian kebijakan ini adalah adanya kontribusi dari masyarakat sebagai sasaran dan penerima program PHBS ini. Menurut Grindle tersedianya sumber daya yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan kebijakan akan mempermudah pelaksanaannya. Sumber daya ini berupa tenaga kerja, keahlian, dana, sarana, dan lain – lain. Dalam pelaksanaan program PHBS ini, untuk ketersediaan sumber daya seperti yang di kemukakan oleh Grindle masih belum sesuai dengan teori tersebut. Hal tersebut terlihat dari hasil wawancara di lapangan sumber daya petugas dalam melakukan praktik kegiatan PHBS belum memahami dengan benar. Selain itu untuk mencapai keberhasilan dalam pelaksanaan program PHBS ini perlu adanya kesadaran masyarakat untuk merubah kebiasaan buruk yang sering dilakukannya dan beralih ke kebiasaan hidup bersih dan sehat.

Dimensi Konteks Kebijakan

Selain dari isi kebijakan, konteks implementasi kebijakan pun perlu diperhatikan dalam pengimplementasian suatu kebijakan agar dapat diketahui hal apa saja yang termasuk kedalam konteks kebijakan dalam sebuah implementasi kebijakan. Berdasarkan teori Grindle, konteks kebijakan merupakan hal yang menentukan bagi keberhasilan suatu implementasi kebijakan termasuk juga program PHBS. Berikut ini merupakan penjelasan mengenai konteks kebijakan tersebut.

Kekuasaan, Kepentingan dan Strategi Aktor yang Terlibat

Pelaksanaan dari suatu kebijakan tidak akan lepas terpengaruhi dari kekuasaan, kepentingan dan juga strategi yang dilakukan oleh para aktor, baik oleh pemuat kebijakan, pelaksana bahkan juga aktor lain di luar itu

yang disengaja ataupun tidak disengaja, dan baik secara langsung ataupun tidak langsung. Berikut ini adalah pemaparan dari petugas Kecamatan Cisalak anggota Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat sebagai berikut : “Mengenai permasalahan penyalahgunaan kepentingan – kepentingan ataupun permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan program PHBS, pada awal akan masuknya program ini terjadi kurang koordinasi karena pada awal permusyawaratan program tersebut, ada perwakilan dari instansi yang tidak mengikuti karena tidak adanya konfirmasi ataupun koordinasi dari pihak lain”.

Kemudian Kepala SR PT. Tirta Investama mengungkapkan pendapatnya mengenai indikator ini yaitu sebagai berikut: “Pada tahap pembangunan penampungan air, masyarakat sendiri yang melakukannya seefektif kerja bakti. Namun terkadang masyarakat malah menggunakan tukang bangunan untuk membangun tempat penampungan air tersebut. jadi hal itu membuktikan kurang keikutsertaan langsung atau partisipasi masyarakat kurang terhadap pembangunan penampungan air tersebut. selain itu, pada proses penentuan letak penyimpanan pembangunan air tersebut masih dipengaruhi oleh faktor – faktor kedekatan warga dengan aktor yang terlibat sehingga penampungan airnya dibangun disekitar rumahnya yang menyebabkan ketidakmerataannya distribusi air tersebut ke rumah – rumah yang lain”.

Hal yang sama disampaikan juga oleh Petugas KESLING Puskesmas Kecamatan Cisalak sebagai berikut : “Sumber daya manusia dalam pelaksanaan program ini tentu orang yang memang ditugaskan untuk melaksanakan tugas pelayanan PHBS di desa sasaran yang telah ditetapkan sebagai penerima program PHBS tersebut. Mengenai adanya keterlibatan aktor yang terlibat selama pembuatan atau pembangunan fasilitas PHBS ini tidak lepas dari masyarakat yang ingin fasilitasnya dibangun di wilayah sekitar rumahnya agar dapat menerima dan memanfaatkan fasilitas dengan mudah, tanpa melihat dan memperhitungkan masyarakat lain akan dapat memanfaatkannya juga atau tidak. Masyarakat ada yang memanfaatkan kekerabatan, kekeluargaan dengan aktor terlibat untuk memperoleh atau mendapatkan

izin pembangunan penampungannya di wilayah tempat tinggal atau rumahnya tersebut”.

Adapun hasil wawancara dengan ketua LPM Desa Mayang yang merupakan daerah yang mendapatkan bantuan air bersih mengatakan : “Pembangunan fasilitas PHBS ini belum benar – benar merata jadi ada sebagian kampung yang belum menerima program tersebut padahal saya lihat kampung tersebut lingkungannya masih kotor. Dan untuk mendapatkan akses air untuk mandi dan mencuci harus pergi ke sungai. Tapi kita sadar sendiri, jadi kalau ada kampung yang belum mendapat bantuan air bersih kita gerakkan masyarakat untuk membantu”.

Berikut ini hasil wawancara dengan warga Kampung Patrol Desa Mayang sebagai berikut : “Ya, memang dalam pelaksanaan pembuatan tempat penampungan air suka ada campur tangan pihak lain, dari BPS, karang taruna”.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan penulis, mengenai kekuasaan, kepentingan – kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan CSR melalui kegiatan PHBS di Kecamatan Cisalak yaitu dengan sistem jemput bola ke lapangan. Sementara pelaksana ditingkat bawah, para pelaksana kebijakan CSR melalui kegiatan CSR adalah masyarakat itu sendiri. Kemudian ada faktor dari luar yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan CSR itu sendiri seperti LSM sehingga penempatan penampungan air yang kurang strategis karena dalam penempatannya masih melibatkan peran atau kekuasaan dari aktor yang terlibat untuk menentukan lokasi penampungan air bersih tersebut sehingga menempatkan pembangunan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan masyarakat tidak mendapatkan air bersih secara adil dan merata.

Menurut Grindle pelaksanaan dari suatu kebijakan tidak akan lepas terpengaruhi dari kekuasaan, kepentingan dan juga strategi yang dilakukan oleh para aktor, baik oleh pemuat kebijakan, pelaksana bahkan juga aktor lain di luar itu yang disengaja ataupun tidak disengaja, dan baik secara langsung ataupun tidak langsung. Melihat kenyataan dilapangan mengenai pelaksanaan kebijakan CSR sudah ada relevansi dengan teori yang dikemukakan oleh Grindle tersebut.

Karakteristik Lembaga dan Penguasa

Dalam implementasi kebijakan yang telah dibuat, maka pelaksanaannya akan terlepas dari karakteristik atau peran dari para pelaksana kebijakan itu sendiri. Karakteristik *stakeholders* dalam hal ini sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing – masing instansi terkait dalam melaksanakan tugasnya. Setiap instansi tentu memiliki perannya masing – masing di dalam pengimplementasian program PHBS di Kecamatan Cisalak.

Kepala SR PT. Tirta Investama mengungkapkan mengenai karakteristik lembaga dan penguasa, sebagai berikut: “Pertama, tahap awal kerjasama yang kita lakukan adalah musyawarah di desa dengan pihak – pihak tersebut. Pihak kami merancang bantuan program PHBS karena melihat masalah yang dialami oleh masyarakat. jadi pihak kami PT. Tirta Investama juga mempunyai tanggungjawab terhadap lingkungan sekitar apalagi PT. Tirta Investama merupakan perusahaan air maka tanggungjawab terhadap lingkungan sekitar yaitu kegiatan PHBS. untuk kelancaran kegiatan tersebut kami bekerjasama dengan pihak kecamatan setempat agar kegiatan tersebut bisa di terapkan di masyarakat dengan jenis bantuan membuat penampungan air bersih dan saluran ke setiap rumah warga sehingga masyarakat mendapatkan fasilitas air bersih”.

Berikut ini adalah pemaparan dari petugas Kecamatan Cisalak anggota Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat sebagai berikut : “Dukungan kelembagaan untuk program kegiatan PHBS dilaksanakan oleh pemerintah dan di Cisalak dilaksanakan oleh puskesmas cisalak, Kecamatan Cisalak, pihak desa, kelembagaan tingkat masyarakat. Kalau untuk pihak kecamatan, para petugasnya sudah sering bekerjasama dengan pihak puskesmas dan desa untuk kelancaran kegiatan PHBS. Jadi sebelum ada sosialisasi kita adakan rapat dulu dengan seluruh pihak yang terlibat ”.

Adapun hasil wawancara dengan petugas bagian KESLING Puskesmas Kecamatan Cisalak sebagai berikut : “iya memang adarapat dari pihak yang terlibat sebelum melaksanakan kegiatan PHBS. Koordinasi awal yang dilakukan adalah dengan menyiapkan kader di berbagai desa, dilakukannya musyawarah di desa – desa dengan pihak – pihak tersebut. Kalau untuk

puskesmas sebagai komponen yang kedua tidak mendapatkan informasi atau koordinasi dari instansi lain untuk melakukan musyawarah sehingga puskesmas memulai tugasnya ke tahap pemicuan masyarakat untuk memberikan informasi dan wawasan mengenai kesehatan dan kebersihan lingkungan”.

Adapun hasil wawancara dengan ketua LPM Desa Darmaga yang merupakan daerah yang mendapatkan bantuan air bersih mengatakan : “Pembangunan fasilitas PHBS ini belum benar – benar merata jadi ada sebagian kampung yang belum menerima program tersebut padahal saya lihat kampung tersebut lingkungannya masih kotor. Dan untuk mendapatkan akses air untuk mandi dan mencuci harus pergi ke sungai. Tapi kita sadar sendiri, jadi kalau ada kampung yang belum mendapat bantuan air bersih kita gerakkan masyarakat untuk membantu”.

kemudian peneliti mewawancarai masyarakat Kampung Nyalindung Desa Darmaga mengenai indikator ini yaitu sebagai berikut: “Kalau pihak yang melaksanakan kegiatan PHBS ini, seperti dari para petugas Kecamatan, para perawat atau bidan yang dari Puskesmas Cisalak kalau ada pengarahannya di Desa itu pada bagus sikap penyampaian cara – cara hidup sehat dan bersih. Penyampaiannya kalau lagi pidato di depan mudah ditangkap. Waktu itu para petugas pernah bilang katanya kalau kegiatan PHBS ini jangan mengandalkan pihak Kecamatan atau Puskesmas atau Desa, tapi harus didukung juga oleh para RT, RW Kader dan masyarakatnya”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan tersebut, organisasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan politis dengan jalan melakukan koordinasi yang baik. Terkait dengan pelaksanaan kebijakan CSR dalam kegiatan PHBS, pihak pemerintah setempat dan pihak yang terlibat lainnya sudah bekerjasama dengan baik hal tersebut sudah sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Grindle.

Kepatuhan dan Daya Tanggap

Hal ini juga bagian penting dari proses implementasi suatu kebijakan, dimana tingkat kepatuhan dan adanya respon dari para pelaksana kebijakan merupakan aksi nyata dari para pelaksana untuk melaksanakan tugas

pokok dan fungsinya dalam pengimplementasian program PHBS agar dapat terlaksana dengan baik, secara optimal, dan berdaya guna. Semua pelaksana tersebut memiliki tupoksi masing – masing dalam melaksanakan perannya masing – masing dalam melaksanakan perannya masing – masing dalam program PHBS tersebut.

Berikut adalah hasil wawancara dengan Kepala SR PT. Tirta Investama mengenai kepatuhan dan daya tanggap, sebagai berikut: “Kesadaran untuk melaksanakan tupoksinya masing – masing merupakan bukti kepatuhan dan adanya respon dari para pelaksana. dan tentunya setiap instansi yang terkait dengan program PHBS ini memiliki tugas pokok masing – masing. Dinas Kesehatan memfasilitasi program tersebut, untuk pelaksanaannya puskesmas setempat dan Kecamatan beserta stafnya yang melaksanakan pembangunan di sektor lapangan”.

Hal tersebut dibenarkan oleh Ketua LPM Desa Mayang yang menyebutkan bahwa “tugas kami yaitu memfasilitasi untuk keberlangsungan program PHBS ini. Dan dengan dibantu oleh pihak puskesmas setempat agar masyarakat benar – benar mengerti mengenai program ini yaitu dengan melakukan pemicuan kepada masyarakat dan apabila terjadi kerusakan saluran airnya macet atau air menjadi keruh ,kemudian airnya dirumah warga ada yang sebagian jalan dan ada yang tidak. Kita langsung terjun kelapangan untuk membenahi kerusakan tersebut dengan dibantu oleh masyarakat setempat”.

Adapun wawancara dengan petugas KESLING puskesmas Kecamatan Cisalak, yaitu: “Seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, kami bertugas melakukan pemicuan terhadap masyarakat sebelum program tersebut dilaksanakan. pemicuan tersebut dilakukan setiap minggunya untuk memberikan informasi kepada masyarakat bahwa perilaku hidup bersih dan sehat itu penting”.

Namun kenyataan yang terjadi masih terdapat masyarakat yang masih mandi dan mencuci atau bahkan kegiatan lainnya di sungai. Hal tersebut menunjukkan kurangnya kepatuhan dari masyarakat. Hal tersebut dibenarkan oleh petugas Kecamatan Cisalak anggota Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat yang menyatakan

“masyarakat tidak menggunakan sarana yang diberikan oleh pemerintah dengan berbagai alasan, seperti letak penampungannya jauh dari rumah. Padahal jika di dibandingkan dengan manfaat yang dirasakan lebih baik menempuh jarak yang cukup jauh dibandingkan harus menggunakan air sungai yang kotor. Selain itu, kalau ada kerusakan seperti airnya tidak jalan, atau airnya keruh atau kotor, kita langsung bekerjasama dengan Pihak Desa setempat agar langsung membenarkan kerusakan tersebut”.

Adapun wawancara dengan warga Kampung Nyalindung Desa Darmaga yaitu sebagai berikut: “pada awal munculnya PHBS ini memang rata – rata masyarakat antusias dengan menggunakan sarana dari pemerintah, namun memang pada awal pembangunan yang kurang gotong royong jadi masih ada aja masyarakat yang tidak secara rutin bayar iuran untuk perawatan sarana tersebut. kemudian lokasi rumah dengan sarana PHBS mempengaruhi masyarakat, jadi yang dekat sering menggunakan dan membayar iuran sedangkan yang jauh rasa memilikinya kurang dan memang sedikit acuh dengan program ini. Yang saya suka kesal, kalau sudah mengalami kerusakan airnya tidak jalan, tapi dari pihak pemerintah setempat kadang tidak langsung membenarkannya padahal dari pihak kami sebagai masyarakat langsung melapor kalau terjadi kerusakan. Kerusakan itu kadang air tidak jalan sampai 3 – 4 hari sehingga kami terpaksa harus mandi dan mencuci ke sungai lagi”.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seluruh lembaga maupun instansi yang terkait dengan program PHBS ini memiliki perannya masing – masing dalam mengimplementasikan program ini. Aspek koordinasi sangat penting dalam mensukseskan program PHBS ini, yang lebih penting adalah berada pada tingkat Kecamatan karena terkait dengan distribusi dan geografi desa/kelurahan sasaran diwilayahnya, karena Kecamatan sangat tepat untuk mengkoordinasi kelompok sasaran program PHBS ini. Kemudian, daya tanggap pemerintah setempat terhadap keluhan masyarakat mengenai kerusakan air yang terkadang tidak jalan, tidak ditanggapi secara langsung. Kenyataan dilapangan tersebut bahwa daya tanggap petugas dalam kegiatan PHBS belum sepenuhnya sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Grindle. Dimana menurut Grindle proses implementasi suatu

kebijakan, dapat dilihat dari tingkat kepatuhan dan adanya respon dari para pelaksana kebijakan merupakan aksi nyata dari para pelaksana untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam pengimplementasian program PHBS.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan – temuan dilapangan mengenai implementasi kebijakan CSR melalui kegiatan PHBS di Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang, peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut:

Pada implementasi yang dilaksanakan belum dapat dikatakan berhasil dan berjalan optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari :

- a. Kepentingan yang terpengaruhi dalam kebijakan CSR ini adalah masyarakat Kecamatan Cisalak. Maka dari itu sasaran dari kebijakan sudah sesuai dengan kenyataan dilapangan.
- b. Implementasi kebijakan CSR melalui kegiatan PHBS, mengenai jenis manfaat yang dihasilkannya masih belum memberikan jenis manfaat yang benar – benar sangat baik. Hal tersebut dilihat dari temuan dilapangan bahwa dalam implementasinya terdapat penyimpanan tempat penampungan air bersih yang tidak merata di dalam penempatannya.
- c. PHBS masih belum memberikan perubahan yang baik. Derajat perubahan kegiatan PHBS tersebut dikarenakan masih kurangnya peran serta masyarakat dalam mensukseskan kebijakan CSR melalui kegiatan PHBS ini.
- d. Pada pelaksanaan kegiatan PHBS, mengenai kedudukan pembuat kebijakan sudah bekerjasama dengan instansi terkait secara baik.
- e. Mengenai siapa pelaksana kegiatan PHBS di Kecamatan Cisalak sudah terstruktur. Tetapi untuk pemberian petunjuk teknis, petugas belum sepenuhnya melaksanakan dengan baik.
- f. Sumber daya yang digunakan dalam melakukan kegiatan PHBS belum memahami dengan benar pelaksanaan kegiatan PHBS ini dan juga sangat sulit untuk merubah kebiasaan masyarakat

untuk beralih ke kehidupan bersih dan sehat.

1. Konteks Kebijakan
 - a. Adanya penempatan penampungan air yang kurang strategis karena dalam penempatannya masih melibatkan peran atau kekuasaan dari aktor yang terlibat untuk menentukan lokasi penampungan air bersih tersebut sehingga menempatkan pembangunan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan masyarakat tidak mendapatkan air bersih secara adil dan merata.
 - b. Dalam melaksanakan tugas pokoknya masing – masing, lembaga atau instansi sudah melakukan tugasnya dengan baik dan telah terjalin kerjasama yang baik antar lembaga atau instansi yang terkait dengan kegiatan phbs.
 - c. Kurang adanya koordinasi dari instansi terkait sehingga pada saat musyawarah di desa, tidak semua instansi terkait ikut hadir dalam rapat. Dan kurangnya daya tanggap pemerintah setempat terhadap keluhan masyarakat mengenai kerusakan air yang terkadang tidak jalan tetapi tidak ditanggapi secara langsung.

DAFTAR PUSTAKA

1. Agustino Leo.2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung.
2. .2012. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta: Bandung.
3. Creswell, J. W. (2010). *Research design: pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed*. Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar.
4. Ismail, M. (2013) . *Corporate Social Responsibility and Its Role in Community Development: An International Perspective*. The Journal of International Social Research Volume 2(9).
5. Moeloeng, Lexy J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
6. Notoatmodjo, S. 2007. *Pendidikan dan Perilaku kesehatan*.Cetakan 2 Jakarta:PT. Rineka Cipta.
7. Nugroho, Riant. 2014. *Public Policy*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo

8. Pasolong, Her bani. 2013 *Teori Administrasi Publik* : Alfabeta.
9. Rusli, Budiman. 2013. *Kebijakan Publik. Membangun Pelayanan Publik yang Responsif*. Bandung: Hakim Publisher.
10. Saidi, Z. dan Hamid Abidin (2004) *.Wacana dan Praktek Kedermawanan Sosial di Indonesia*. Piramedia, Jakarta.
11. Soenarko, 2003. *Public Policy: Pengertian Pokok Untuk Memahami dan Analisa Kebijakan Pemerintahan, Cetakan Kedua*. Airlangga University Press. Jakarta.
12. Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: CV Alfabeta.
13. Suharto, Edi. 2006. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: Refika Aditama
14. Tachjan, Dr. H, M.Si. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI
15. Tangkilisan, Hessel Nogi S 2003. *Kebijakan Publik yang Membumi*. Yogyakarta: Yayasan Pembaruan Aministrasi Publik Indonesia (YPAPI) & Lukman Offset.
16. Usman, Nurdin. (2002). *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada.
17. Wahab, Solichin Abdul. 2004. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta:PT. Bumi Aksara.
18. Wibisono. 2007. *Membedah Konsep dan Aplikasi Corporate Social Responsibility*. Surabaya: Media Grapika
19. Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik :Teori dan Proses*. Yogyakarta :Med Press (Anggota IKAPI).
20. .2012. *Kebijakan Publik, Teori, Proses, dan Studi Kasus edisi & Revisi Terbaru*. CAPS. Yogyakarta.
21. Undang – Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
22. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggungjawab Sosial
23. Peraturan Menteri Kesehatan RI No 2269/MENKES/PER/XI/2011
24. Departemen Pekerjaan Umum tahun 2007
25. Departemen Kesehatan RI Tahun 2011
26. Perda Provinsi Jawa Barat No 02 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tanggungjawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Serta Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan Di Jawa Barat.
27. Bappeda Kabupaten Subang Tahun 2015
28. Puskesmas Kecamatan Cisalak Tahun 2015